

Kajian Pengembangan Konsep Waterfront City Di Kawasan Pesisir Kota Ambon

Rivai Notanubun¹, Mussadun²

Diterima : 3 April 2017

Disetujui : 29 Mei 2017

ABSTRACT

Various activities that exist in this area utilized by the local government as the starting point of planning Ambon Waterfront City. This research aims to study the development concept of Waterfront City in the coastal area of Ambon City. This research approach using qualitative methods that used the method of purposive sampling and snowball techniques. The analysis process used a triangulation technique. The research results showed that the coastal area of Sirimau District, from physical environment aspect, show the characteristic of hilly topography and mountainsides. The problems in the economic's aspect showed by the system of fishing production, which less optimum in the utilization of fishery products. It caused by less innovation of fish processing and the limitation of infrastructures and facilities, and promotion of this product. Furthermore, the problems of social culture aspect, shown in the disappearance of local identities of coastal communities, disappearance priority of coastal activity, and less public awareness regarding the coastal area management. Based on these results, the coastal area in the City of Ambon did not accord yet with the development plans, theories, and concepts of Waterfront City. Therefore, to fit this area characteristics with the truth Waterfront City concepts, it is important to direct the development of this concept according to the characteristic of the coastal area through to the intervention of programs as follows: a). Rezoning of coastal settlements pursue the regulation of conservation areas along the river and coastal, b). Re-conservation of the damaged coral reef, c). Rehabilitation and coastal zone reclamation as the main trades and services zones corresponding to the service functions that support Waterfront City's concepts.

Keyword: Waterfront City, Coastal Areas

ABSTRAK

Aktivitas dan potensi yang ada di kawasan pesisir kota Ambon merupakan isu dasar titik tolak Pemerintah Kota Ambon dalam membuat perencanaan Ambon Waterfront City. Tujuan penelitian adalah mengkaji pengembangan konsep waterfront city di kawasan pesisir Kota Ambon. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan cara purposive sampling dan snowball, sedangkan untuk teknis analisis yang akan digunakan dengan cara teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan wilayah pesisir Kecamatan Sirimau jika ditinjau dari aspek fisik lingkungan, memiliki kondisi karakter topografi yang berbukit dan berlereng gunung. Permasalahan ekonomi yang ditemui dalam sistem produksi yaitu belum optimalnya pemanfaatan hasil tangkapan karena keterbatasan inovasi, pengolahan hasil produksi, serta keterbatasan sarana prasarana dan informasi promosi, serta belum tersedia fasilitas dan sarana penunjang untuk mendukung aktivitas pariwisata. Dari aspek sosial budaya, hilangnya identitas lokal masyarakat, serta aktivitas bercirikan pesisir bukan lagi prioritas. Berdasarkan hasil tersebut, kawasan pesisir Kota Ambon belum sesuai dengan rencana dan teori konsep Waterfront City. Oleh karena itu, perlu arah pengembangan konsep waterfront city yang sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir dengan cara, antara lain: (a) Kawasan permukiman yang berada di pesisir perlu pemugaran maupun penataan dengan mengikuti acuan sempadan pantai maupun sempadan sungai (rezoning), (b) Pelestarian kembali terumbu karang yang sudah rusak melalui konservasi (c) pada kawasan perdagangan jasa perlu direhabilitasi dan direklamasi sesuai fungsi pelayanan yang mendukung konsep waterfront city.

Kata Kunci: Waterfront City, Kawasan Pesisir

¹Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. DI Panjaitan No. 2 Ambon-Maluku
Kontak Penulis : rivainotanubun@yahoo.co.id

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Kondisi yang dinamis Kota Ambon sebagai Ibu kota Provinsi dan pusat kegiatan nasional (PKN) di Timur Indonesia yang di dukung dengan sektor utama kota sebagai pusat jasa dan perdagangan tentunya berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan pembangunan dan kepadatan penduduk yang memiliki kecenderungan didominasi faktor urbanisasi penduduk dan perubahan lingkungan, maka untuk mendukung dan mengatur kondisi tersebut, dalam penataan ruang wilayah kota ambon bertujuan untuk (a) mewujudkan ruang wilayah kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (b) mewujudkan kota Ambon sebagai kota jasa di kawasan timur Indonesia; (c) mewujudkan Kota Ambon sebagai *waterfront city* dan *eco city* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (RTRW Kota Ambon, 2011-2031).

Dengan pola pertumbuhan penduduk yang memadati daerah pesisir, maka kawasan tersebut menyimpan masalah yang kompleks, karena masyarakat akan bersentuhan langsung dengan ekosistem pantai dan lautnya. Sehingga jika tidak dibuat suatu perencanaan yang terstruktur maka kawasan tersebut akan tumbuh secara tidak terjendali. Sedangkan secara bersamaan ruang pesisir tersebut akan menjadi identitas khusus yang menjadi tanda pengenal suatu kota dalam wacana global. Isu inilah yang kemudian menjadi titik tolak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam membuat perencanaan Ambon *Waterfront City* yang tertuang dalam Masterplan Perencanaan Ambon *Waterfront City* pada tahun 2009. Dengan memiliki rentan waktu selama 7 tahun sampai dengan tahun 2016, maka berdasarkan fenomena tersebut, pentingnya penelitian ini untuk melihat peneterapan konsep *waterfront city* di kota Ambon dalam menata ruang pesisir dan laut Ambon yang berintegrasi harmonis dengan ruang daratnya, yang bertujuan untuk menciptakan wajah baru bagi garis pantai Ambon yang mampu menunjukkan citra kota Ambon yang bermatra darat dan laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahai pengemabangan konsep *Waterfront City* berdasarkan kondisi kawasan pesisir kota ambon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena, permasalahan bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga variabel yang diteliti mencakup situasi sosial, tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis, (Sugiyono, 2015).

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan teknik triangulasi, merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan pendekatan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam hal triangulasi, Susan Stainback (1988) dalam Sugiono (2015), menjelaskan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Setelah terkumpul berbagai informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang mendalam, maka proses selanjutnya dalam penelitian ini, menggunakan bentuk pengkodean (*coding*) yang mana pengkodean merupakan proses penguraian data, pengonsepan, dan penyusunan kembali.

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Perda Kota Ambon No. 2 Tahun 2006, luas kecamatan sirimau adalah 86,81 km². Kecamatan sirimau merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat Kota Ambon, yang dibagi menjadi 4 desa dan 10 kelurahan. Adapun kelurahan/ desa yang berada di kawasan pesisir yang akan diteliti dalam kecamatan sebagai berikut, sebagai berikut :

1. Kelurahan Honipopu dengan luas 0,34 km², berbatasan dengan Teluk Ambon di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ahusen, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Uritetu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Seilale (Kecamatan Nusaniwe).
2. Kelurahan Uritetu dengan luas 0,35 km², berbatasan dengan Teluk Ambon di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ahusen dan Kelurahan Karang Panjang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rijali dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Uritetu.
3. Kelurahan Rijali dengan luas 0,28 km², berbatasan dengan Teluk Ambon di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Panjang dan Amantelu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Merah dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Rijali.
4. Desa Batu Merah dengan luas 16,67 km², berbatasan dengan Teluk Ambon di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Soya, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pandan Kasturi dan Desa Hative Kecil, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rijali.
5. Desa Hative Kecil dengan luas 1,53 km², berbatasan dengan Teluk Ambon di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa batu Merah, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Galala, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pandan Kasturi.
6. Desa Galala dengan luas 0,12 km², berbatasan dengan Teluk Ambon di sebelah utara, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Desa Hative Kecil, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Halong (Kecamatan Teluk Ambon Baguala).

KAJIAN TEORI

Menurut Butuner (2006) Konsep *waterfront city* menjelaskan bahwa pertama kali pada abad ke-19, konsep *waterfront* diaplikasikan untuk merevitalisasi kawasan industri yang ada di kawasan pesisir San Fransisco, Boston dan Amerika. Tujuan dari pengembangan ini dilakukan untuk menata kembali dari suatu kawasan industri. Oleh karena itu, diterapkan konsep pembangunan *waterfront city* ini sebagai pemulihan kondisi kota-kota tepi air tersebut. Menurut Wen-Cheng Huang dan Sun-Ken Kao (2014), *waterfront* adalah tempat lahirnya budaya dan perekonomian, yang mana berawal dari berkembangnya permukiman maupun desa-desa di tepi air, yang berkembang menjadi jalur perdagangan. *Waterfront City* adalah suatu daerah atau area yang terletak di dekat perbatasan dengan kawasan perairan dimana terdapat kegiatan dan aktivitas berupa ekonomi maupun sosial pada area pertemuan tersebut (Malone, 1996).

Pengembangan Waterfront City adalah sebagai suatu proses pengelolaan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, sosial maupun fisk lingkungan pada kawasan tepian air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke arah perairan (Wren, 1983).

Selama proses pengembangan *waterfront city*, Pemerintah Daerah perlu mengambil peran utama selama perencanaan dan administrasi. Sebuah rencana yang komprehensif biasanya terdiri dari kegiatan pembangunan, yang masing-masing mungkin memiliki perkembangan dan metode perencanaan tersendiri. Dengan begitu diperlukan empat tahap pembangunan, yaitu, perencanaan, konstruksi, manajemen, dan realisasi, (Huang et al., 2008).

Berbagai bidang perkembangan harus ditetapkan sehingga setiap pembagian wilayah dapat digunakan sesuai fungsi dan dapat dikelola secara independen. Pembagian harus dikategorikan berdasarkan kriteria evaluasi seperti ukuran dan lokasi beberapa bidang, fungsi serta manfaat menurut karakteristik wilayah, hal itu merupakan salah satu elemen kunci dasar dalam pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan manfaat internal dan eksternal berbagai bidang pembangunan, ada lima jenis pengembangan bisa dibedakan: 1) infrastruktur, 2) tata kelola, 3) aspek sosial, 4) aspek ekonomi dan 5) fisik lingkungan, sejarah dan budaya (Huang et al., 2006).

Menurut Da dan Xu (2016), bahwa di dalam penelitian yang dilakukan dalam membahas hierarki dan faktor kategori indeks penilaian terhadap *waterfront city*, maka mereka meringkas dalam penilaian *waterfront city* ke dalam tiga kategori, yaitu karakteristik lingkungan pesisir, kegiatan sosial, dan budaya. Pendekatan lain yang dijelaskan oleh Norclife (1996), bahwa pusat kegiatan *waterfront city*, bergerak sangat cepat dan simultan sehingga dapat mempengaruhi tampilan pada kawasan tersebut, yang diakibatkan oleh penggunaan lahan di kawasan tepian air yang dikategorikan berdasarkan aspek ekonomi, sosial budaya dan fisik lingkungan.

Waterfront city memiliki dua jenis, berdasarkan tipe pembangunan dan fungsi menurut Breen dan Rigby (1996), sebagai berikut :

1. Berdasarkan tipe pembangunan, *waterfront* dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
 - a. Konservasi adalah penataan *waterfront* bersejarah yang masih ada sampai saat sekarang dan perlu ada pemeliharaan atau konservasi agar tetap bisa dinikmati masyarakat;
 - b. Pembangunan Kembali (*redevelopment*) adalah memanfaatkan kembali fungsi-fungsi *waterfront* lama yang masih ada sampai saat ini dan tetap digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan merevitalisasi ataupun merekonstruksi fasilitas-fasilitas yang ada.
 - c. Pengembangan (*development*) adalah membangun dan menciptakan *waterfront* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kota dengan mereklamasi pantai.
2. Berdasarkan fungsinya, *waterfront* dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu :
 - a. *Mixed-used waterfront*, merupakan kombinasi pemanfaatan ruang tepi pantai, seperti permukiman, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat kebudayaan.
 - b. *Recreational waterfront*, adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena main, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
 - c. *Residential waterfront*, adalah perumahan, apartemen, dan *resort* yang dibangun di pinggir perairan;
 - d. *Working waterfront*, adalah tempat-tempat penangkapan ikan komersial, reparasi kapal pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan.

Identifikasi dan Menganalisis Kondisi Eksisting Berdasarkan Aspek Fisik Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya

Analisis Kondisi Fisik Lingkungan

a. Topografi

Berdasarkan karakteristik topografi kota Ambon, yang berbukit dan berlereng gunung, Kawasan pesisir yang merupakan kawasan dataran yang sangat sempit dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Sedangkan yang berbatasan dengan perkotaan tersebut langsung berbatasan dengan perbukitan dan bahkan pegunungan yang sangat terjal. Akibatnya kawasan pesisir telah mengalami beberapa perubahan kualitas lingkungan. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa kegiatan pembangunan yang tidak memperhitungkan kondisi geografis, sifat tanah dan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Perkembangan penduduk secara alami maupun karena urbanisasi mengakibatkan kebutuhan akan lahan untuk aktifitas masyarakat telah mendorong perluasan lahan sebagai area pemukiman penduduk. Seperti yang disampaikan oleh Pengamat Lingkungan:

“kondisi topografi kota Ambon itu pegunungan langsung ke pantai, jadi sebagai contoh saja ketika musim hujan itu tanpa tunggu beberapa jam sebagian besar perairan teluk kota Ambon sudah berwarna cokelat” (WPL/04-05.b).

Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Kota Ambon:

“karena permasalahan yang kita temukan adalah semakin luasnya permukiman di bagian resapan air di pegunungan, seperti di kebun cengkeh, gunung nona, dan sebagainya, akhirnya ketika musim hujan, sampah maupun sedimentasi dari pegunungan sudah tidak terkendalikan” (WPB.01-13.b).

b. Sumberdaya Alam

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, Luas ekosistem terumbu karang, mangrove maupun lamun di wilayah Teluk Ambon setiap tahun semakin berkurang terutama di kawasan pesisir Kecamatan Sirimau, seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di wilayah pesisir berdampak pada semakin menurunnya kualitas perairan, yang menyebabkan punahnya ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove. Banyak koloni karang dengan penampang yang lebar mengalami kematian akibat timbunan sedimen lumpur dan sampah. Seperti yang disampaikan oleh Peneliti LIPI Ambon:

“Sedimentasi melalui aliran-aliran sungai di kawasan pesisir Sirimau sudah sangat parah, hal ini terlihat jelas ketika pada waktu musim hujan” (WPL-L/10-1.e).

“Dan kebiasaan masyarakat buang sampah ke sungai dan laut terutama sampah plastik menyebabkan terumbu karang, lamun sepanjang pesisir kecamatan sirimau mati” (WPL-L/10.d).

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan:

“karena jumlah penduduk meningkat serta dengan berbagai kebutuhan lahan untuk pemukiman menyebabkan sedimentasi dan buangan sampah/limbah yang meningkat dari waktu ke waktu (WPKDP/03-11).

Hal ini diperkuat oleh pengamat lingkungan:

“Kalau untuk vegetasi dan biota laut di kawasan pesisir di sekitar kecamatan Sirimau itu sudah tidak ada lagi, karena sedimentasi dari sungai-sungai sekitar kawasan kota sudah sangat tinggi, sehingga vegetasi disekitar situ sudah tidak ada lagi” (WPL/04-06.b).

c. Penggunaan Lahan

Dengan adanya konsentrasi kegiatan di Kecamatan Sirimau yang menjadi pusat kota dan provinsi maka hal ini sangat berimbas kepada tingkat kepadatan bangunan dan penduduk yang menjadi sangat tinggi, hal ini menyebabkan orientasi penggunaan lahan untuk permukiman semakin besar. Kondisi permukiman masyarakat khususnya di kawasan pesisir Kecamatan Sirimau pada umumnya mengumpul. Karena Kecamatan Sirimau merupakan kawasan perkotaan, maka permukiman masyarakat berkembang secara cepat dan menimbulkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sehingga sebagian besar kawasan

pesisir Kecamatan Sirimau tergolong dalam permukiman kumuh, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda:

“kawasan kumuh seperti di batu merah, rijali, honipupu dan uritetu itu kawasannya permukimannya tidak tertata, banyak gang-gang sempit, banyak rumah yang berdempetan, dan karena kawasan itu dekat dengan kawasan pasar batu merah dan mardika, sehingga merupakan salah satu faktor penyebab kawasan-kawasan tersebut menjadi kumuh” (WPB/01-18)

“karena dengan lahan yang sempit dan semakin padat, akhirnya masyarakat sudah memanfaatkan bantaran sungai untuk berbagai aktivitas seperti permukiman maupun aktivitas lainnya” (WPTK/02-06.a).

Hal ini juga disampaikan oleh Pengamat Lingkungan:

“badan sungai sudah dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktifitas” (WPL/04-08).

Dari aspek penggunaan lahan untuk kawasan perdagangan jasa, yang menjadi permasalahan dalam kaitan konsep *Waterfornt City*, terdapat pada kawasan Pertokoan/ Pasar di Batu Merah dan Mardika, karena pada kawasan tersebut, berdasarkan pengamatan sudah tidak terawat, banyak bangunan-bangunan semi permanen yang didirikan pada tepi-tepi pantai. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Kota Ambon:

“lingkungan pasar dan ruko di sekitar kawasan Batu Merah yang dimiliki belum mendukung konsep tersebut karena menghalangi pandangan ke teluk ambon” (WPB/01-16.b).

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Tata Kota:

“karena pertumbuhan yang begitu cepat dan tidak terkontrol dikawasan sekitar pasar batu merah dan mardika” (WPTK/02-07).

d. Penataan Bangunan dan Lingkungan

- Kondisi Bangunan

Bentuk atau citra karakteristik bangunan yang ada di kawasan pesisir yang membelakangi perairan Teluk Ambon terbentuk berdasarkan tradisi masyarakat lokal yang akhirnya menjadi kebiasaan masyarakat sampai sekarang, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Tata Kota:

“Ada alasan mengapa dari dahulu rumah-rumah di kawasan pesisir membelakangi pantai, karena secara budaya, nelayan sekembalinya menangkap ikan langsung ke dapur” (WPTK/02-04).

- Kondisi Lingkungan

Pada kawasan pesisir di kecamatan Sirimau, yang terjadi pada saat ini di ditemukan adanya kejadian banjir terutama luapan sungai, yang diakibatkan saluran yang tidak berfungsi dengan optimal akibat rusaknya badan saluran atau tersumbat sampah, Hal ini berdampak pada kerusakan dan pencemaran sungai sampai ke laut. Seperti yang disampaikan oleh PPK Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PU:

“Hal ini disebabkan karena saluran drainase tidak saja berfungsi sebagai saluran penampungan air hujan saja, namun juga berfungsi pula untuk pembuangan air kotor dan pembuangan sampah dari masyarakat” (WPDPU/09-7.b).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pejabat Desa Batu Merah

“Beberapa saluran drainase yang ada tidak berfungsi dengan baik akibat dimensi yang terlalu kecil, banyak terdapat sampah serta kerusakan pada beberapa bagian saluran” (WPD-L/11-02).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lurah Honipupu:

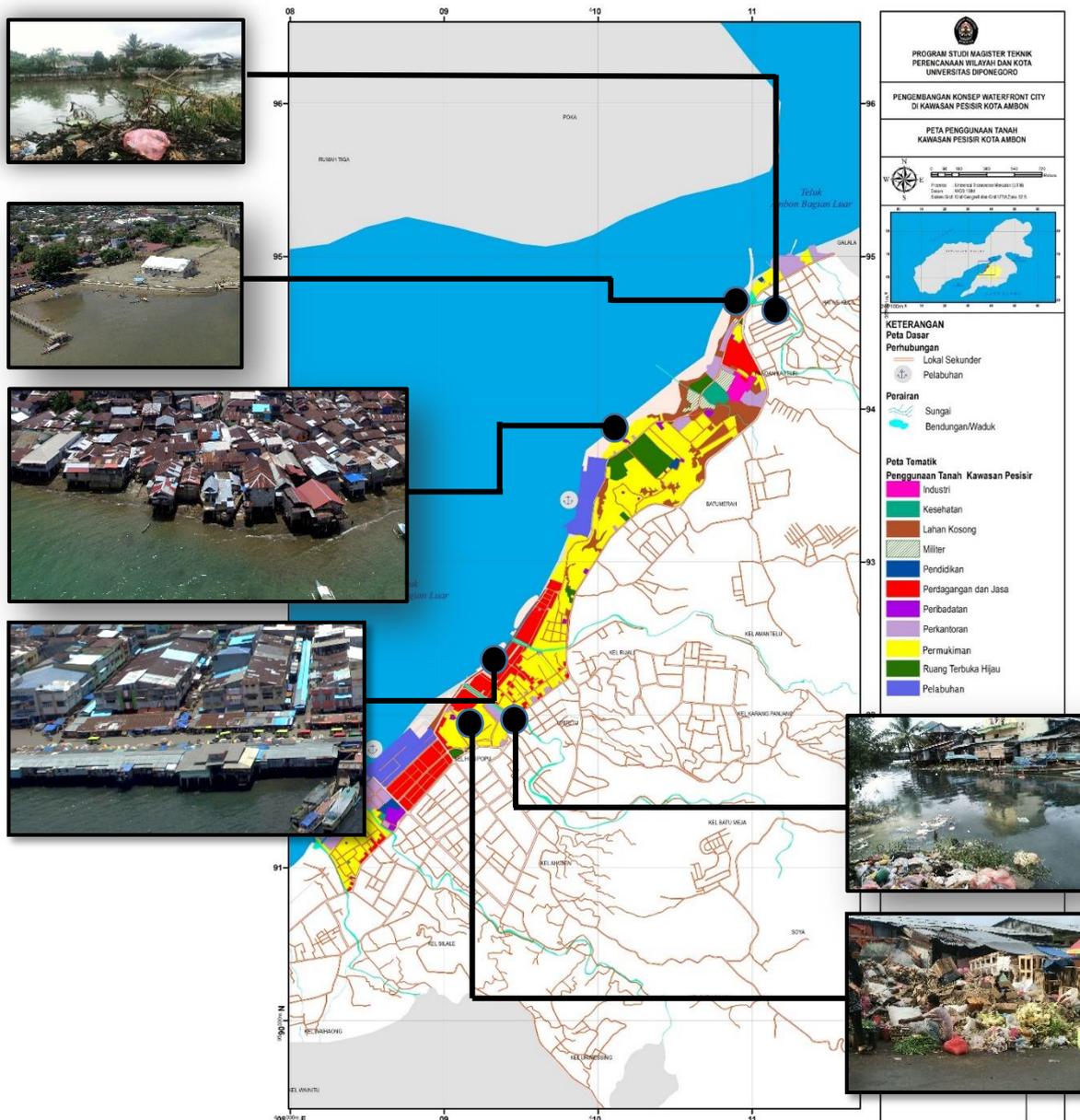
“sebagian kecil saluran atau dreinase di seputaran kelurahan kita tersumbat” (WPD-L/15.3).

Kawasan pesisir Kecamatan Sirimau juga masih memiliki permasalahan terkait penyediaan sistem sanitasi air limbah untuk masyarakat pada beberapa lingkungan permukiman yang relatif padat seperti di kawasan pesisir, perumahan penduduknya belum dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti yang disampaikan oleh PPK Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PU:

“Air kotor ini tidak memiliki penampungan khusus, tapi dialirkan langsung ke saluran terbuka atau saluran drainase yang langsung menuju sungai atau laut”(WDPDU/09-1.a).

Hal yang sama disampaikan oleh Lurah Rijali:

“penyediaan ruang bagi sumur resapan untuk buangan air limbah sementara belum ada, yang masih terjadi saluran pembuangan langsung masuk ke kali” (WPD-L/14.03).



Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1
KONDISI FISIK LINGKUNGAN

Analisis Kondisi Ekonomi

Sistem Produksi

Kecamatan Sirimau, bukan sebagai kawasan pengembangan potensi sumberdaya laut, namun sebagai Kecamatan yang masuk dalam Satuan Pengembangan Wilayah I dengan memiliki kesatuan fungsional sebagai pemusatan fungsi pelayanan primer, maka Kecamatan Sirimau memiliki pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan ikan yang memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya laut yang dimiliki oleh perairan maupun pesisir pulau Ambon sebagai kebutuhan pangan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan:

“Kalau dilihat dari trend produksi penangkapan ikan, memang tidak seluruhnya dihasilkan oleh nelayan, namun akan tetapi dihasilkan juga oleh perusahaan perikanan di luar kawasan teluk dan pesisir Kota Ambon, karena berbagai perusahaan perikanan mempunyai yang namanya fishing base di Kota Ambon, hal itu yang memberikan kesempatan untuk kapal-kapal yang dimiliki perusahaan tersebut dapat mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan pandan kasturi yang mana bisa dimanfaatkan untuk ekspor atau dijual antar pulau atau juga untuk dikonsumsi sendiri” (WPDPP/05-02).

Komoditas potensi unggulan pada sektor perikanan adalah ikan jenis pelagis besar yaitu ikan cakalang dan ikan tuna. Dari keseluruhan produksi ikan yang menjadi trend produksi adalah pengolahan ikan asap, yang sebagian besar produk olahan dari jenis ikan cakalang, sedangkan untuk produk hasil perikanan non konsumsi yang dimiliki kecamatan Sirimau dan satu-satunya yang dimiliki di Kota Ambon, yaitu hasil olahan seperti kerang yang diproses menjadi cenderamata yang memiliki nilai seni, namun memiliki kendala dalam pemanfaatan hasil-hasil perikanan tangkap maupun non pangan yaitu belum adanya inovasi dalam pemanfaatan pengelolaan yang bisa menjadi nilai tambah perekonomian untuk masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan:

“Dengan limpahan produksi perikanan yang dihasilkan naik setiap tahun, namun kita memiliki kendala dalam pemanfaatan hasil-hasil perikanan tangkap, selama ini hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, belum adanya inovasi dalam pemanfaatan pengelolaan yang bisa menjadi nilai tambah perekonomian untuk masyarakat, karena masih sebatas olahan menjadi ikan asap. Karena sistem pasca panen untuk potensi produksi masih kurang bahkan belum ditemukan dalam bentuk sentra-sentra pengolahan, selama ini masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat sekitar” (WPDKP/03-06).

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

“memang belum adanya satu kawasan terpadu untuk mengkomodir sistem produksi sumber daya alam laut secara terpusat, memang selama ini yang terjadi untuk kegiatan produksi terkait sumber daya alam laut masih dikelola secara tradisional yang dilakukan kelompok-kelompok usaha kecil masyarakat” (WPDKP/03-06).

Sistem Distribusi

Dalam sistem distribusi hasil perikanan semua bersumber dari Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Sirimau, dengan pemasarannya sendiri untuk masyarakat kota Ambon dan di ekspor ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dengan hasil sumber daya perikanan yang begitu berlimpah namun terjadi permasalahan terhadap peningkatan masyarakat nelayan, karena dalam sistem distribusi di Pelabuhan Perikanan Kecamatan Sirimau sendiri belum optimalnya tempat pelelangan ikan sebagai pengontrol harga ikan maupun mengontrol stock ikan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan:

“hasil tangkapannya langsung di jual ke pasar, sehingga proses pelelangan ikan jarang terjadi, itulah yang menyebabkan harga jual ikan rendah” (WPDKP/04-04.a).

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

***“Nelayan-nelayan tersebut harus menjual ikan hasil tangkapan mereka kepada tauke (Pemilik modal)”
(WPDPP/05-06.b).***

Permasalahan lain yang ditemukan terkait proses distribusi hasil perikanan yang dimiliki Kecamatan Sirimau yaitu terkait untuk produk olahan ikan yang sudah berkembang dan terkenal di Kota Ambon adalah ikan asap cakalang dan kerajinan kerang, yang mana belum adanya sinkronisasi antara masyarakat dan Pemerintah dalam pengembangan hasil-hasil produksi untuk di distribusikan secara meluas baik di pasar lokal maupun di ekspor. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

“Lemahnya sumber daya manusia pada masyarakat untuk mau mengembangkan produk-produk hasil olahan mereka menjadi produk yang berorientasi pasar dengan nilai jual yang tinggi. Ini di karenakan untuk mengubah mindset dan kebiasaan perilaku masyarakat agak sulit” (WPDPP/05-06.c).

Pengembangan olahan masih terbatas pada kualitas SDM dan teknologi. Masyarakat masih membutuhkan intervensi teknologi. Olahan prodak ikan cakalang asap yang sudah berkembang berpeluang untuk dikembangkan dengan intervensi teknologi yang menjamin kualitas rasa, higienis, dan daya tahan. Ikan asap cair menjadi salah satu produk yang berpeluang dikembangkan dengan pendekatan teknologi serta rendahnya media informasi dalam mempromosikan hasil produk masyarakat juga sebagai salah satu kendala dalam penunjang distribusi hasil produksi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

“Olahan ikan asap masih sebatas kreativitas masyarakat dari dulu sampe sekarang seperti itu saja, menurut saya harus ada pengembangan teknologi untuk meingkatkan hasil produksi ikan olahan agar dari kualitas terjamin dan dari daya tahan bisa lama untuk di ekspor” (WPDPP/05/06.d).

Pariwisata

Dalam menunjang pengembangan wisata bahari yang menjadi bagian dari aspek untuk menjadikan Ambon sebagai *Waterfront City*, secara khusus pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Sirimau belum termanfaatkan dan dikelola secara baik karena jika dilihat dari aspek ekosistem laut yang berpotensi sebagai daya tarik wisata sudah tidak bisa dimanfaatkan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Tata Kota:

“Di Kecamatan Sirimau, yang menjadi konsen kita di bidang pariwisata untuk kawasan pesisir ini memang belum ada, karena memang kalau untuk potensi-potensi laut tidak dimungkinkan lagi sebagai salah satu potensi pariwisata” (WPTK/02-13).

Pendekatan yang sekarang dikembangkan Pemerintah dalam kaitan dengan pariwisata di Kecamatan Sirimau, Pemerintah lebih fokus pada pariwisata yang tidak berkaitan langsung dengan wisata bahari, tetap lebih kepada penunjang pariwisata sesuai dengan fungsi dari Kecamatan Sirimau yang menjadi kawasan perkotaan sebagai penyediaan jasa, seperti tersedianya hotel maupun penyediaan kawasan kuliner, namun kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas maupun sarana dan prasarana penunjang pendukung pariwisata, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda:

“perlu ada penyediaan sarana untuk mendukung kegiatan pariwisata tersebut” (WPB/01-09.a).

Kelemahan lain yang menjadi permasalahan terkait pariwisata adalah, belum adanya manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mampu mengelola maupun memanfaatkan potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebagai pariwisata, seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Bappeda:

“Karena kalau mau lihat yang ada sekarang ini seperti tempat-tempat wisata, Saya belum melihat adanya kelompok-kelompok masyarakat yang secara mandiri mengelola tempat-tempat wisata yang ada di Ambon, termasuk di kawasan pesisir kecamatan sirimau yang kegiatan pariwisatanya insidentil ketika ada kegiatan pesta teluk” (WPB/01.17.b).

Kondisi Sosial Budaya

Kearifan Lokal

Sasi yang dikenal selama ini sebagai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Maluku secara umum, sebagai pranata hukum adat yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, sudah tidak ditemukan lagi di desa-desa adat yang terdapat di Kecamatan Sirimau. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata:

“Seperti kearifan lokal masyarakat maluku seperti misalnya sasi sudah tidak ada lagi di desa-desa yang berada di Kota Ambon” (WPDPK/06-01.a).

Hal ini juga disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan:

“Secara umum, untuk di kota Ambon sudah tidak ada lagi yang kita kenal dengan sasi” (WPDKP/03-09.a).

Aktivitas Masyarakat

Kecamatan Sirimau tidak lagi didominasi oleh aktivitas yang bercirikan pesisir, tetapi telah menunjukkan perkembangan sesuai dengan perkembangan kota berdasarkan ketersediaan pelayanan publik dan infrastruktur pendukungnya, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda:

“Secara spesifik, nelayan tetap ada tetapi dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan kecil bukan lagi dalam kelompok-kelompok nelayan skala menengah sampai besar” (WPB/01-10.a).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Lurah Honipopu:

“Iya kayanya di honipopu pada umumnya tidak ada nelayan lagi, data terakhir kita itu tidak ada nelayan” (WPD-L/15.5).

Di wilayah ekologis ini memiliki permasalahan serius dalam pemanfaatan/ pengelolaan sumber daya alam pesisirnya, mengalami penurunan dari tahun 2013 dan 2014 yang disebabkan karena adanya regenerasi usaha yang tidak berjalan, kondisi perairan juga berpengaruh serta kurangnya motivasi usaha pemasaran dan pembudiya.

Budaya

Pranata-pranata sosial dan budaya serta politik antar-desa atau antar-kekerabatan telah menjadi panduan dan hukum adat yang mampu menjamin ketertiban hubungan sosial diantara anggota masyarakat. Tatanan dan pranata adat inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi penghidupan hubungan persaudaraan dari masyarakat lokal di Ambon. Dalam kaitannya pengembangan kegiatan di wilayah pesisir untuk menunjang dan menjaga pelestarian budaya Pela gandong di Kota Ambon, Pemerintah Daerah mengagendakan acara pesta teluk Ambon secara rutin. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga:

“Dalam rangka melestarikan budaya masyarakat Maluku, setiap tahun Pemerintah menyelenggarakan Pesta Teluk, ini biasanya menjadi ajang penampilan budaya yang dimiliki oleh orang Maluku selain menjaga kelestariannya, juga sebagai salah satu program pariwisata” (WPDPK/06-03).

Hal ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Bappeda:

“pesta teluk ini bertujuan untuk terus melestarikan budaya pela-gandong atau budaya tali persaudaraan orang Maluku, serta pagelaran seni dan budaya Maluku” (WPB/01-17.b).

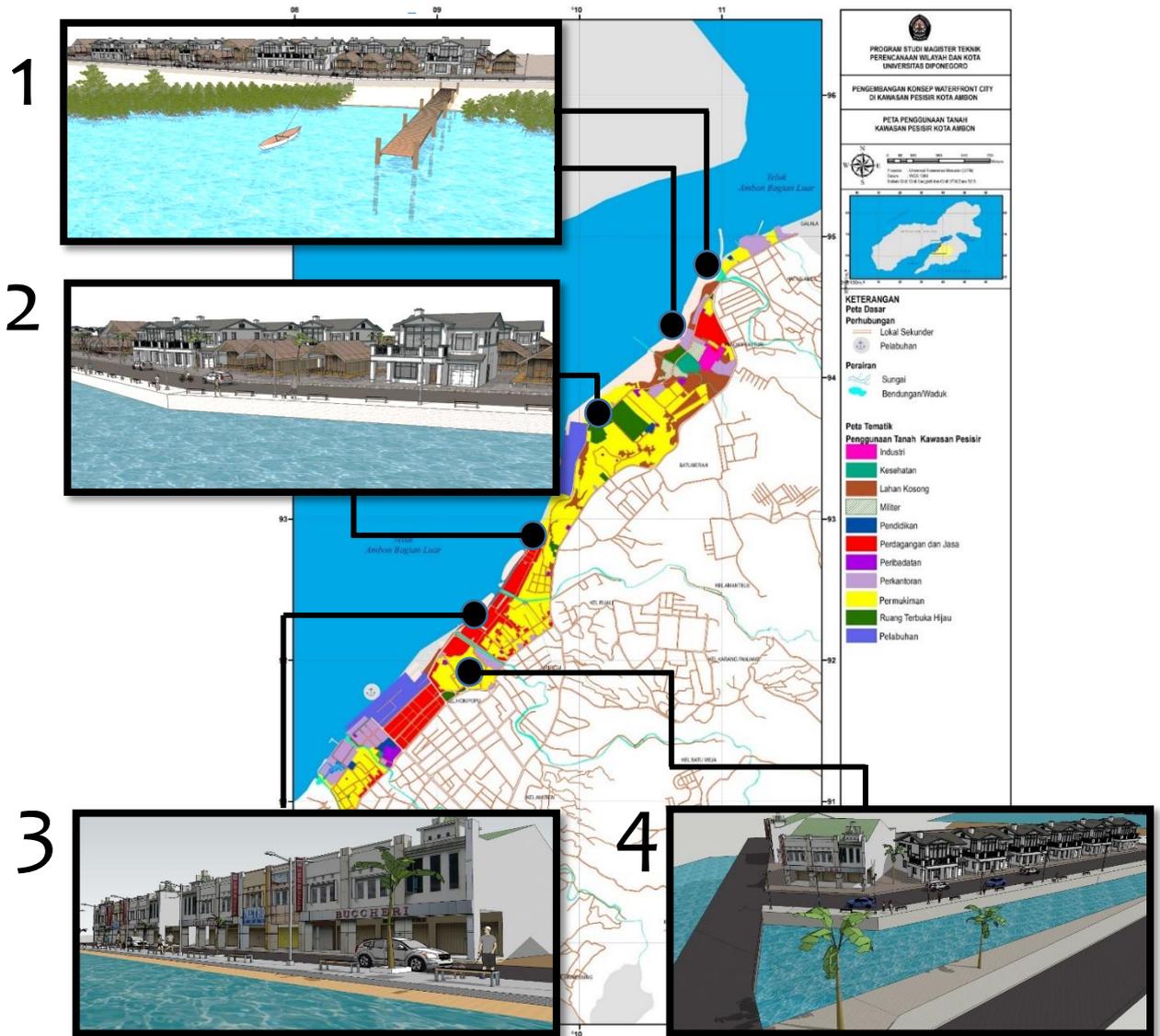
Namun dalam pengembangannya terdapat beberapa masalah terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat di pagelaran pesta teluk tersebut, serta kurangnya sosialisasi, selain itu pembiayaan dalam memfasilitasi masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam kurangnya keterlibatan masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga: *“Permasalahan yang paling utama itu memang sosialisasi, karena diharapkan itu pesta teluk diikuti oleh 11 kabupaten kota terlibat, seperti ada beberapa acara, yang diharapkan keterlibatan kabupaten kota untuk ikut serta, seperti kaya lomba perahu belang, itu kan tidak semua kabupaten kota memiliki, jadi memang kita harus pengadaan untuk dihibahkan ke kabupaten kota, karena dengan alasan-alasan itu mereka tidak terlibat” (WPDPK/06-08).*

Analisis Pengembangan Konsep Waterfront City di Kawasan Pesisir

Adapun keterkaitan dari aspek fisik, yang menyebabkan penurunan kualitas kawasan pesisir, sehingga perlu pengembangan dalam meningkatkan kualitas ruang terbangun di kawasan pesisir Kecamatan Sirimau dalam rangka mendukung pengembangan konsep waterfront city di kawasan pesisir Kota Ambon, yang menyesuaikan dengan karakteristik kawasan pesisir Kecamatan Sirimau, sebagai berikut:

1. Pada kawasan pesisir Galala dan pandan Kasturi yang dulunya memiliki terumbu karang, mangrove dan lamun, dapat dikembangkan sebagai potensi wisata bahari dengan cara konservasi.
2. Penyesuaian kembali garis sempadan pantai 5-25 m, dan penataan kembali kawasan permukiman di kawasan pandan kasturi, dengan revitalisasi, pemugaran serta penataan, sedangkan untuk yang sudah melewati garis sempadan perlu direlokasi
3. Pengembangan kawasan Batu Merah-Mardika, dengan dikembangkan pedestrian ways ditepi pantai, merevitalisasi pertokoan, memperbaharui tampilan, dan menata pedagang kaki lima serta pengembangan secara reklamasi.
4. Pada kawasan permukiman di Kelurahan Honipopu, Uritetu, Rijali perlu pengembalian sempadan sungai 3 m, dengan penataan serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti rehabilitasi drainase, penyediaan sistem pengolahan limbah, penataan lingkungan, sedangkan pengembangan permukiman yang masuk di sempadan sungai perlu penyediaan rusun.



Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 2
PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kondisi eksiting Kecamatan Sirimau dari aspek fisik lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, dapat disimpulkan bahwa Kota Ambon belum sesuai dengan konsep *waterfront city*, sehingga perlu adanya pengembangan yang sesuai potensi-potensi yang dimiliki kawasan pesisir Kecamatan Sirimau dalam rangka menunjang Konsep *Waterfront City* di Kawasan Pesisir Kota Ambon.

Berdasarkan karakteristik dan kondisi eksisting kawasan pesisir Kecamatan Sirimau, yang memiliki potensi pengembangan konsep *waterfront city* di kawasan pesisir Kota Ambon maka hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kecamatan Sirimau perlu arah pengembangan konsep *waterfront city* sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan cara antara lain:

(a) Kawasan permukiman yang berada di pesisir di perlu penataan dengan mengikuti acuan sempadan pantai (*rezoning*), (b) Pelestarian kembali terumbu karang yang sudah rusak di pesisir Galala dan Pandan Kasturi melalui konservasi (c) pada kawasan perdagangan jasa perlu direhabilitasi dan direklamasi sesuai fungsi pelayanan yang mendukung konsep *waterfront city* (d) Pendekatan pemugaran serta pelestarian terhadap permukiman kumuh yang berada di kawasan pesisir.

Pengembangan aktivitas perikanan dengan menyediakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kawasan Pelabuhan Perikanan Pandan Kasturi, selain itu pengembangan infrastruktur sangat perlu untuk mendukung kegiatan pengolahan hasil-hasil perikanan dan kegiatan pemasaran yang akan berdampak pada bertambahnya nilai jual dan kualitas produk. Perlu adanya peran Pemerintah terhadap pengembangan SDM dalam peningkatan kualitas produk maupun kemasan hasil olahan sangat penting melalui peningkatan sosialisasi maupun bimbingan terhadap masyarakat, serta pengembangan sistem informasi promosi sangat perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan penjualan hasil produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam pengembangan industri perikanan maupun dari sektor penunjang aktivitas pesisir seperti pengembangan pariwisata dan budaya, perlu adanya pendekatan yang berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan maupun secara tidak langsung melibatkan masyarakat terhadap terjaganya kualitas lingkungan, serta pentingnya perhatian terhadap masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut, dengan cara mensosialisasikan terkait pengelolaan sumber daya alam pesisir, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal maupun budaya masyarakat pesisir sebagai pendukung karakter *waterfront city*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bren A. and D. Rigby. 1996. *The New Waterfront, Worlwide Urban Succes Story*. New York; Mc Graw.
- Butuner, Bas. 2008. *Waterfront Revitalization as a Challenging Urban Issue In Istanbul*. Poland : IsoCarp Congress
- BPS Kota Ambon. 2016. *Kota Ambon Dalam Angka*. Ambon: BPS Kota Ambon
- Da, Ting., Xu, Yejun. 2016. *Evaluation on Connectivity of Urban Waterfront Redevelopment Under Hesitant Fuzzy Lingustic Environment*. *Ocean & Coastal Management.*, pp. 101-110
- Huang, W.C., Kao, S.K., Chen, K.Y., 2008. *Successful experience for the publice private partnerships of waterfront development: the example of world exposition*. In: *The Third International Conference on Public Management in 21st Century: Opportunities and Challenges*, Macao, China.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Malone, P., 1996. *City, Capital and Water* (Chinese translation, translated) by Hu, C. J., 1999). Chuang Xing Publication Co. Ltd, Taipei.
- Norclife, Glen. 1996. *The Emergence of Postmodernism on The Urban Waterfront. Geographical perspectives on changing relationships*. Vol. 2 pp 123-134

- Nicholas, Falk. 2002. The Renaissance Urban Waterfront. British Waterways, Crest Nicholson, English Partnerships and King Sturge & Co.
- When-Ching Huang and Sung-Ken Kao. 2014. Public Private Partnership During Waterfront Development Process: The Example of The World exposition. Taiwan, pp 28-39
- Wrenn, D. 1983. Urban Waterfront Development. Washington DC : The Urban Land Insitute.